

STANDAR KUALITAS PENDIDIKAN DASAR DI NIGERIA: STUDI KEPUSTAKAAN

¹Muhamad Ahyar Rasidi, ²Ernaliana

¹Universitas Islam Negeri Mataram, ²Universitas Mataram

¹ahyarrasidi@uinmataram.ac.id, ²pascaunramernaliana@gmail.com.

Abstrak. Peran dan fungsi Pendidikan memiliki efek yang menjalar pada semua sector terutama dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Nigeria sebagai sebuah negara yang tertinggal dari aspek Pendidikan melakukan reformasi secara total terhadap sistem pendidikannya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai artikel. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Persoalan Pendidikan Nigeria menyangkut guru, fasilitas, dan anggaran. Jumlah guru yang berkualifikasi Diploma sebanyak 4,8%, asosiasi Pendidikan dan sarjana Pendidikan sejumlah 13%. Adapun ketersediaan fasilitas seperti Gedung, perpustakaan dan laboratorium tidak memadai. Reformasi Pendidikan dilakukan pemerintah Nigeria dilakukan dengan beragam terobosan diantaranya sertifikasi guru, Menyusun regulasi berbasis kesetaraan gender, peningkatan jumlah guru dan mengurangi disparitas. Peningkatan kualitas guru dikembangkan melalui training dan optimalisasi 8 standar Pendidikan.

Kata Kunci: Kualitas Pendidikan, Sumber Daya Manusia, Reformasi Guru.

PENDAHULUAN

Pendidikan berperan sebagai agen nasional pembangunan dan globalisasi. Penjaminan kualitas Pendidikan tidak dapat dibiarkan atau dilepaskan begitu saja pada bagian-bagian Pendidikan, pengendalian dan pengontrolan kualitas Pendidikan juga merupakan tanggungjawab negara, masyarakat dan unsur terkecil seperti sekolah melalui pengembangan teknologi informasi. Agar dapat menjamin kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui pelatihan, workshop dan lain sebagainya yang dapat memberikan pengalaman dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam Pendidikan.

Nigeria merupakan salah satu negara yang menandatangani kesepakatan untuk mengembangkan kualitas Pendidikan sesuai dengan amanat UNESCO. Mandat tersebut memberikan standar yang tinggi bagi kualitas Pendidikan dasar. Penjaminan kualitas Pendidikan dasar merupakan tanggungjawab Nigeria sebagai salah satu negara yang tergabung dalam UBE (*Universal Basic Education*). UBE merupakan sebuah strategi untuk mengembangkan Pendidikan agar setiap anak berhak mengenyam Pendidikan yang sama¹.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu Pendidikan dasar Nigeria diwujudkan melalui program sertifikasi guru. Jaminan kualitas adalah mekanisme yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan ketepatan proses belajar mengajar di sekolah dasar sehingga menjamin pelayanan Pendidikan yang berkualitas tinggi. Metode lain juga digiatkan secara holistik untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam sistem Pendidikan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam system Pendidikan dan untuk memastikan peningkatan mutu Pendidikan berkelanjutan. Hal ini juga digambarkan sebagai cara untuk menyebarluaskan informasi mengenai kualitas utama pendidikan².

¹ Kingdom, Orji & Job. *The Role of Education In National Development: Nigerian Experience*. European. *Scientific Journal October*. Edition Vol. 9, No.28 ISSN: 1857-7881 (Print) e-ISSN 1857-7431, 2013.

² Moja, T. *Nigeria Education Sector Analysis: An Analytical Synthesis Of Performance And Main Issues* Visiting Professor Of Higher Education New York University Department Of Administration, Leadership And Technology. New York, NY, 2000.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka. Data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran berbagai referensi yang menyangkut obyek penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi.

PEMBAHASAN

Definisi, Peran Dan Fungsi Pendidikan

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara³. Tujuan undang-undang tersebut dapat diaktualisasikan melalui pengembangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia tidak terpusat pada satu tempat melainkan tersebar diseluruh pelosok negeri. Persebaran Sistem pendidikan menyebabkan kualitas pendidikan di setiap daerah berbeda-beda, sehingga penting untuk pengembang sistem pendidikan untuk dapat mengelola sekolah-sekolah tersebut dengan baik

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan karena pendidikan merupakan kebutuhan manusia dan merupakan hajat orang banyak. Setiap warga negara tidak boleh ada yang tidak terjamah oleh pendidikan, sebagaimana yang tercermin dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dalam Hasbullah yaitu “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Ini bermakna bahwa dalam kondisi apapun bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan pendidikan bagi setiap warga negaranya⁴.

Dalam menjalankannya peran dan fungsinya sebagai pelaksana kegiatan pendidikan, pemerintah memerlukan mitra dalam menjalankannya. Unit-unit pendidikan yang dibangun, dikontrol, dan didukung oleh masyarakat dalam menjamin kualitasnya, karena Pendidikan tidak dapat beroperasi sebagai entitas yang tidak terpisahkan dengan masyarakat⁵. Masyarakat sebagai konsumen pendidikan, masyarakat juga sebagai agen perubahan. Demikian juga dukungan keluarga, keterlibatan keluarga dalam pengembangan pendidikan membantu menumbuhkembangkan respon keterampilan dan perubahan siswa⁶. Dukungan keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan pendekatan yang komprehensif menumbuhkan sikap positif tentang sekolah, keluarga dan anggota masyarakat karena menghormati kapasitas yang bervariasi dari populasi sekolah secara keseluruhan⁷.

Korelasi peran antara pemerintah, masyarakat dan guru penting dilakukan untuk menjamin kualitas pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Sinergitas ketiga elemen di atas secara bersama-sama membuat kebijakan yang dapat mendukung tujuan pendidikan tersebut yang lebih dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS). Menurut Mulyasa⁸, manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi yang ditunjukkan dengan pernyataan politik dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Pelaksanaan MBS memberi kewenangan kepada sekolah untuk

³ Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴ Hasbullah. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). hlm. 243

⁵ Henderson, N. (2011). Collaborative Strategies To Advance student Learning. *National Education Association*. 1-77

⁶ Weiss, H. B., et al. Reframing Family Involvement In Education: Supporting Families To Support Educational Equity. *Research Review* No. 5 (1-52), 2009. hlm. 15

⁷ Davis, D. Supporting Parent, Family, and Community Involvement in Your School. *Northwest Regional Educational Laboratory*, (1-39), 2003. hlm. 3

⁸ Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi Dan Implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). hlm.11

mengambil kebijakan sesuai dengan kemandirian sekolah itu sendiri⁹. Kebijakan umum yang distandarisasi pemerintah diterjemahkan dalam kebijakan unit satuan pendidikan.

Tantangan Peningkatan Pendidikan di Nigeria

Pendidikan merupakan hak individu seseorang sebagai warga Negara. Nigeria Sebagai Negara yang turut menandatangani UBE, Nigeria bertanggungjawab terhadap semua warga Negaranya untuk memperoleh hak dasar yaitu pendidikan. Salah satu persoalan pendidikan di Nigeria adalah disparitas pendidikan. Kesenjangan pendidikan antar sekolah. Fasilitas pembelajaran tidak merata dan tidak disertai dengan finansial yang matang. Kesenjangan juga dapat disebabkan oleh factor ekonomi, perbedaan kulit, suku dan agama. Perbedaan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan juga memerlukan perlakuan yang sama walaupun memiliki perbedaan etnis dan sosioekonomi

Disparitas pendidikan dapat di kurangi melalui pendekatan psikologis (*A Report by the American Psychological Association Presidential Task Force on Educational Disparities*). Kontribusi psikologis dalam mengurangi disparitas pendidikan dapat dilakukan dengan mengenal sumberdaya diri, keterbatasan, agama dan pendidikan. Demikian juga dengan memperkenalkan satu identitas kebangsaan sebagai sesame anak bangsa

Disparitas finansial lembaga pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap pelayanannya. Sekolah sebagai lembaga yang mengeksekusi anggaran diharapkan memberikan kontribusi sesuai dengan rencana anggaran biayanya. Sekolah tidak dapat terlalu banyak berharap memperoleh bantuan dari pemerintah maupun donator lainnya, sekolah juga berupaya untuk mengelola sumber daya yang ada dalam pengawasannya. OECD merekomendasikan agar sekolah dapat memperoleh sumber dana tambahan dari penggalangan siswanya untuk menabung, menjadikan financial sebagai bagian dari kurikulum¹⁰. Pendidikan financial memerlukan proses jangka panjang, sehingga dalam proses tersebut, siswa akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan menabung yang dilakukan, termasuk teknik mengelola keuangan

Selain disparitas keuangan, pendidikan di atas, persoalan yang dihadapi pemerintah Nigeria adalah tingginya angka putus sekolah dan rendahnya kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan kemampuan guru dalam mengaplikasikan keterampilan baik sebagai pendidik maupun sebagai fasilitator. Angka putus sekolah tidak hanya disebabkan oleh malas, kekurangan gizi dan lain sebagainya melainkan disebabkan oleh kekeliruan pihak sekolah, guru dan masyarakat termasuk karena kebijakan-kebijakan yang sifatnya ahistoris, yang cenderung menyeragamkan program-program intervensi, sehingga anak-anak justru merasa teralienasi dengan kegiatan belajar-mengajar daripada memahami sekolah sebagai eskalator untuk memperbaiki masa depan¹¹.

Tingginya angka putus sekolah disebabkan oleh perbedaan gender. Pada tahun 2003, 7 juta anak-anak Nigeria mendaftar masuk di pendidikan dasar, dimana 62 % dari total keseluruhan anak adalah perempuan, ini berarti bahwa angka putus sekolah tertinggi adalah anak perempuan Soji¹². Banyaknya anak perempuan putus sekolah di Nigeria dapat memperlambat masa depan negara tersebut, karena sejatinya, madrasah pertama seorang anak adalah ketika ia bersama keluarganya terutama ibunya. Apa jadinya jika seorang ibu tidak mampu memberikan pengetahuan dasar kepada anaknya. Hal tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah dan guru di sekolah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar siswa betah sekolah yaitu;

⁹ Hasbullah. *Otonomi Pendidikan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm.66

¹⁰ OECD. Financial education in school. *International Network On Final Education*. Artikel (1-8), 2008.

¹¹ Suyanto, B. Penyusunan Kebijakan dan Program Untuk Mengeliminasi Angka Putus Sekolah Dan Siswa Rawan *Drop Out* Di Provinsi Jawa Timur. Makalah Diseminarkan Di Seminar Riset Yang dilaksanakan di The Aryaduta Lippo Village, Tangerang, 2012. *Proceeding*, (1-484)

¹² Soji O. *Revitalizing Nigerian Education in Digital Age*. (Newyork: Trafford Publishing, 2012). hlm. 424

pengurangan ukuran kelas, layanan konseling, kegiatan ekstrakurikuler, program pengembangan pemuda dan rekreasi, mentoring dan bimbingan, penghapusan ujian, dan guru yang sabar¹³. Selain itu, tingginya angka putus sekolah disebabkan kondisi demografis suatu daerah dengan desentralisasi fiskalnya¹⁴. Kondisi suatu daerah seperti kemiskinan, sosial ekonomi dan karakteristik daerah seperti jawa-non jawa memberi sumbangan besar memunculkan disparitas akses untuk sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari disparitas tersebut adalah dengan mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) untuk pendidikan dan non-kependidikan serta meningkatkan pendapatan asli daerah

Komparasi persoalan dan tantangan pendidikan yang dihadapi Nigeria dan Indonesia banyak memiliki kesamaan. Kesamaan dari faktor rasio guru dan siswa, finansial dan tingginya angka putus sekolah. Hasil penelitian di Nigeria menjelaskan bahwa satu berbanding 30 diantara guru yang dapat menjalankan kebijakan nasional dalam mengurangi disparitas antar sekolah, demikian juga angka kehadiran guru relatif kurang, rekam jejak pekerjaannya, dan penguasaan bahasa yang juga relatif buruk. Perbedaan jumlah guru laki-laki sebesar 31% dan guru perempuan sebesar 66%. Di Indonesia, jumlah guru perempuan lebih banyak dari jumlah guru laki-laki, pada tahun 2011/2012, jumlah guru perempuan baik berstatus negeri maupun swasta sebesar 584.752 orang dan perempuan sebanyak 965.524 orang. Persamaan lain juga adalah rasio guru dan siswa belumlah tepat sehingga jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ditangani yaitu idealnya setiap guru mengawasi 20 orang namun pada kenyataannya melebihi 30 orang.

Disparitas lain di Indonesia juga tercermin pada tingkat kesejahteraan dan kompetensi guru. Guru memiliki insentif yang lebih kecil dibandingkan profesi lainnya, lebih-lebih guru honor, insentif gajinya terkadang mencapai Rp 200.000-300.000, perbulan, tidak sesuai dengan beban tugas yang diberikan. Hal ini yang menyebabkan profesi guru menjadi profesi sampingan bagi sebagian kalangan, mengurangi motivasi mengajar. Guru yang baik adalah guru yang dapat memastikan bahwa relasi dan instruksionalnya baik, karena motivasi guru berhubungan langsung dengan jaminan kualitas guru¹⁵.

Guru sebagai tulang punggung pendidikan sudah seharusnya negara menjamin kehidupannya. Sebaik apapun sistem pendidikan, jika tidak didukung dan dimotori oleh guru, maka sistem itu terasa tidak memiliki harapan. Namun sistem pendidikan yang baik dan didukung oleh guru yang baik dan profesional akan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan sistem pendidikan tersebut. sebagai sebuah profesi, guru merupakan profesi yang membutuhkan profesionalitas karena diartikan dengan *digugu dan ditiru* yang berarti merupakan seorang yang memiliki perilaku yang ditaati dan ditiru¹⁶. Guru juga profesi yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan ketelatenan untuk menciptakan anak memiliki perilaku sesuai dengan yang diharapkan

Konsekuensi kesalahan dari pekerjaan Menjadi seorang guru tidaklah sesederhana pekerjaan lain seperti memperbaiki pipa yang bocor yang skenario terburuknya adalah banjir, namun dapat diperbaiki dengan memperbaikinya. Sedangkan konsekuensi menjadi guru jauh lebih serius, guru yang gagal akan menghasilkan siswa yang gagal. Kegagalan anak-anak akan melekat dalam pikiran mereka sehingga sulit untuk mengembangkan citra diri. Anak-anak yang sudah dicap gagal akan membatasi diri memaksimalkan potensi berprestasi. Disamping itu, kegagalan guru dalam mengajarkan anak membaca dan menulis jauh lebih serius dari sekedar kesalahan dalam pengerjaan lain¹⁷.

¹³ Shalin, D.N. *Highschool Graduation And Dropout Rates In Nevada*. (Las Vegas: Tyler, 2012). hlm. 17

¹⁴ Doriza, S., Purwanto, D. A., & Maulida, E. Fiscal Decentralization and Disparity of Access to Primary Education in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2013. 14 (223-233)

¹⁵ Ofojebe, W. N & Ezugoh, T. C. Teachers' motivation and its influence on quality assurance in the nigerian educational system. *An International Multi-Disciplinary Journal*. Vol. 4 (2) April, 2010

¹⁶ Suparlan. *Guru Sebagai Profesi*. (Yogyakarta; Hikayat, 2006). hlm. 117

¹⁷ Arthur, J., Grainger, T & Wray, D. *Learning To Teach In The Primary School*. (New York: Routledge, 2006).

Konsekuensi keberhasilan menjadi guru ialah membantu siswa belajar untuk mencapai perkembangan fisik, sosial, intelektual, dan emosi yang lebih baik. Guru dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan untuk menumbuhkan semangat belajar dan menggunakan pengetahuan pada dunia yang sebenarnya dengan berfikir kritis dan logis. Guru juga berperan untuk membuat perbedaan diantara siswa terutama yang terkait dengan pelajaran, dengan perbedaan tersebut, segala upaya orang tua agar memperoleh guru yang terbaik mendidik anaknya¹⁸. Mulianya profesi guru tersebut sepatasnya sebanding dengan tingkat kesejahteraan yang diterima

Jaminan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar

Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda tentang mutu pendidikan. Mutu dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain, sehingga tidak aneh jika ada dua pakar yang tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang bagaimana cara menciptakan institusi yang baik¹⁹. Mutu pendidikan perlu dikontrol dan dikelola dengan baik. Penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama elemen pendidikan. Untuk bisa menghasilkan mutu, menurut Slamet, terdapat empat usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu; 1) Menciptakan situasi “menang-menang” (win-win solution) dan bukan situasi “kalah-menang” diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholders*), 2) Perlu ditumbuhkembangkan motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu, 3) Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang, 4) Kerjasama semua elemen mewujudkan mutu

Penjaminan mutu pendidikan tidak terlepas dari pemerataan fasilitas pendidikan baik sekolah di pedesaan maupun perkotaan, personalia dan kepemimpinan yang efektif. Usaha peningkatan mutu pendidikan diwujudkan melalui berbagai upaya diantaranya adalah penataan kurikulum, penataan lembaga, penataan mutu lulusan, dan pembudayaan kepemimpinan yang efektif. Salah satu faktor yang membuat organisasi dapat berkembang adalah kompetensi manajernya²⁰. Manajemen mutu merupakan sarana yang memungkinkan para profesional pendidikan dapat beradaptasi dengan “kekuatan perubahan” yang menghantam sistem pendidikan kita

Tidak ada suatu sistem pendidikan yang paling baik dari sistem pendidikan yang ada, setiap sistem pendidikan memiliki kekurangan dan kelebihan. Sistem pendidikan Nigeria banyak dipengaruhi oleh pengaruh etnis suku Hausa di utara (21% dari populasi), Yoruba di barat daya (21%). Igbo, juga disebut sebagai Ibo, di tenggara (20%), dan Fulani di utara (9%)²¹ (Ian, 2004: 8). Jumlah populasi tersebut mempengaruhi sistem pendidikan di Nigeria. Sama halnya di Indonesia, suku Jawa memiliki populasi yang besar dibandingkan suku lain yang ada di Indonesia, sehingga kebudayaan suku Jawa banyak mempengaruhi suku lainnya

Kebijakan sistem pendidikan nasional Nigeria pada tahun 1999 bahwa tidak ada perbedaan gender dalam pendidikan. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Namun tidak hanya gender penyebabnya, melainkan banyak faktor diantaranya adalah aturan tradisional yang mengaturnya bahwa kedudukan laki-laki harus lebih tinggi dari kedudukan perempuan, sehingga perempuan tidak mampu berkembang dengan baik secara

¹⁸ Hall, G. E., Quinn, L. F. & Gollnick, D. M. *Mengajar Dengan Senang*. (Jakarta: PT Indeks, 2008).

¹⁹ Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education*, (London: Kogam Page, 1993).

²⁰ Pidarta, M. *Manajemen pendidikan Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

²¹ Ian G. *Nigeria Country File*. (London: Franklin Watts, 2004).

ekonomi, politik dan pendidikan. Penyebab lainnya adalah tingginya angka pernikahan dini, sanitasi yang buruk dan kekurangan guru perempuan²².

Tugas terberat pemerintah Nigeria adalah mengkonsolidasi persamaan gender. Gender merupakan suatu yang dapat memperlambat kemajuan peradaban suatu bangsa. Gender juga dirasakan oleh semua negara. Di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda, selain gender, stratifikasi sosial juga menjadi persoalan, bahwa pendidikan hanya milik orang-orang tertentu, misalnya pendidikan hanya untuk anak bangsawan dan laki-laki. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan memperlambat kemajuan Indonesia. Demikian halnya di Nigeria, di Indonesia juga dipengaruhi oleh aturan tradisional bahwa hanya anak laki-laki yang berhak mengenyam pendidikan setinggi-tingginya sedangkan anak perempuan bertugas sebagai istri dan bersalin. Kondisi ini sangat memperhatikan sehingga R. A Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita menyatakan bahwa laki-laki dan wanita berhak memperoleh pendidikan yang sama. Sehingga akhirnya budaya orang Indonesia mau menerima persamaan antara laki-laki dan perempuan, hingga terbukti presiden Indonesia ke-4 berasal dari kaum perempuan

Jauh sebelum Nigeria mengeluarkan kebijakan nasionalnya agar sistem pendidikan terlepas dari Gender, Indonesia sudah menerapkannya. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah Nigeria terhadap Gender, maka pemerintah Nigeria meluncurkan program UBE. UBE merupakan sebuah program pendidikan dasar gratis, sehingga salah satu dari skema yang dihasilkan UBE adalah peningkatan progresif jumlah anak yang mendaftar sekolah²³. Pada bulan Mei 2004, Legislatif Nigeria berhasil meloloskan RUU UBE menjadi undang-undang. Pendidikan Dasar Umum Gratis no.66 tahun 2004 merupakan reformasi yang paling signifikan dan cara yang paling komprehensif dalam menangani penyimpangan dari *Universal Basic Education* (UBE) dan isu-isu akses, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, keterjangkauan dan kualitas

Kebijakan menggratiskan SD oleh pemerintah Nigeria memberikan angin segar atas perubahan kemajuan sistem pendidikan negara tersebut. Berbeda dengan Indonesia, kebijakan pendidikan gratis sudah sampai pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), selangkah lebih maju dari Nigeria. Kebijakan penggratisan tersebut memberikan keringanan kepada masyarakat dalam membiayai pendidikannya. Bertolak belakang dengan pernyataan tersebut, McGuigan, McNally, & Wyness menyatakan bahwa sistem pembiayaan tinggi yang sebenarnya telah dirancang dengan maksud untuk tidak menunda-orang dari latar belakang yang relatif kurang beruntung²⁴. Jadi kebijakan pendidikan berbiaya tinggi bagi sebagian negara hanya untuk menghalangi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh kemajuan pendidikan, hingga selamanya tertinggal

Kebijakan nasional pemerintah Nigeria yang terpopuler adalah pengelolaan kompetensi guru melalui sertifikasi. Sertifikasi merupakan pengakuan pemerintah terhadap kualitas dan kompetensi seorang guru. persyaratan untuk memperoleh sertifikasi diukur dari *performance* dan kompetensinya. Sertifikat tersebut sebagai jaminan bahwa guru tersebut memiliki kemampuan profesional dibidangnya. Kebijakan sertifikasi di Indonesia memiliki perbedaan signifikan dengan Nigeria, di Indonesia selain sebagai alat pengakuan profesionalitas, guru bersertifikasi juga memperoleh insentif dari sertifikat yang dipegangnya. Hal ini menandakan bahwa guru tersebut profesional. Di Nigeria, sertifikasi dilakukan juga untuk mengevaluasi efisiensi dan ketepatan proses belajar mengajar, sedangkan di Indonesia, guru bersertifikasi akan selalu di uji kembali melalui program UKG (ujian kompetensi Guru). pekerjaan seorang guru bukanlah pekerjaan yang sangat mudah

²² British Council from DFID, Gender In Nigeria Report Improving The Lives Of Girls And Women In Nigeria Issues Policies Action 2nd Edition, Volume V Tahun 2012.

²³ Dave, R. H., Perera, D. A., & Ouane, A. *Learning Strategies For Post-Literacy and Continuing Education in Kenya, Nigeria, Tanzania, and United Kingdom*, 1985.

²⁴ McGuigan, McNally, & Wyness. Student Awareness of Costs and Benefits of Educational Decisions: Effects of an Information Campaign. *Centre for the Economics of Education*, (1-50), 2012.

Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ayat 1 tentang guru dan dosen mendefinisikan Guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas guru tidaklah mudah. guru membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan ketelatenan untuk menciptakan anak memiliki perilaku sesuai dengan yang diharapkan

Menurut kebijakan pendidikan nasional Nigeria ada 8 komponen standar kualitas pendidikan yaitu; (1) standar prestasi, (2) partisipasi dan kesejahteraan peserta didik, (3) bimbingan dan dukungan perawatan, (4) kepemimpinan dan manajemen, (5) komunitas sekolah, (6) lingkungan pembelajaran, (7) proses belajar mengajar, (8) dan kurikulum dan aktifitas lainnya. Tiga hal yang paling penting adalah partisipasi dan kesejahteraan peserta didik. Namun yang memberi efek dari kedelapan tersebut adalah kurikulum.

Kurikulum memiliki tiga elemen dasar yaitu penilaian, konten dan keterampilan Pada implementasi kurikulum, guru memiliki peran strategis sebagai subjek yang akan menerapkan kurikulum tersebut. Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pengelolaan dan pelaksanaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional serta fisiknya.

Kebijakan kurikulum berjalan dengan baik juga ditentukan oleh kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan juga menjadi fokus peningkatan kualitas pendidikan dasar di Nigeria. Kepemimpinan dalam konteks ini, adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisasikan guru, lingkungan, masyarakat dan siswa, Fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin, manajer, pendidik, administrator dan lain-lain. Kepala sekolah adalah pemimpin yang mampu memberikan tauladan (*ing ngarso sung tulodo*), seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat seluruh staf untuk mengajukan gagasan (*ing madya mangunkarso*), dan seorang pemimpin harus mampu mewujudkan program-program serta mendorong dan mendukung setiap staf untuk tampil mewujudkan kemampuannya (*tut wuri handayani*)²⁵.

Kebijakan pemerintah dalam pendidikan harus rumuskan dan selesaikan masalah. Rumuskan yaitu kebijakan pendidikan yang dilakukan diketahui persoalannya, dipetakan potensi persoalannya, dan disamakan pelayanannya, sehingga kebijakan pendidikan yang dilakukan benar-benar dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pandangan yang dikemukakan Wahyudin menyatakan bahwa Adanya perubahan kebijakan pendidikan, termasuk desentralisasi pendidikan di sekolah melalui manajemen berbasis sekolah (MBS) memberikan implikasi terhadap inovasi kurikulum dan manajemen kurikulum, baik manajemen kurikulum di tingkat nasional, tingkat provinsi, kabupaten/kota ataupun manajemen kurikulum di tingkat sekolah²⁶

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak terobosan pemerintah Nigeria dalam mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dasar di Negara Bagian Oyo dan Osun diantaranya adalah: (1) Peluncuran program UBE sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pendaftar sekolah dasar; (2) Penyusunan Undang- Undang tentang kesamaan hak antara kaum wanita dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang sama tanpa memperhatikan gender; (3) Tantangan terbesar dalam

²⁵ Zazin, N. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan*. (Jogjakarta: AR-RUZ MEDIA, 2011).

²⁶ Wahyudin, D. Model Pembelajaran *Icare* Pada Kurikulum Mata Pelajaran TIK di SMP *Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11, No. 1, April 2010*

mereformasi peningkatan kualitas pendidikan dasar adalah adanya disparitas yang terlalu jauh antar sekolah, baik aspek finansial, administrasi, kompetensi guru, angka putus sekolah, dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai serta rasio guru dan siswa yang belum cukup. Demikian juga penekanan angka pernikahan dini; (4) Peningkatan jumlah guru melalui proses training, pelatihan, sertifikasi profesional. Selanjutnya adalah menetapkan 8 komponen standar kualitas pendidikan (1) standar prestasi, (2) partisipasi dan kesejahteraan peserta didik, (3) bimbingan dan dukungan perawatan, (4) kepemimpinan dan manajemen, (5) komunitas sekolah, (6) lingkungan pembelajaran, (7) proses belajar mengajar, (8) dan kurikulum dan aktifitas lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- ¹Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Arthur, J., Grainger, T & Wray, D. *Learning To Teach In The Primary School*. New York: Routledge, 2006.
- British Council from DFID. *Gender In Nigeria Report Improving The Lives Of Girls And Women In Nigeria Issues Policies Action 2nd Edition*. Volume V Tahun 2012.
- Davis, D. Supporting Parent, Family, and Community Involvement in Your School. *Northwest Regional Educational Laboratory*, (1-39), 2003.
- Doriza, S., Purwanto, D. A., & Maulida, E. Fiscal Decentralization and Disparity of Access to Primary Education in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2013. 14 (223-233)
- Dave, R. H., Perera, D. A., & Ouane, A. *Learning Strategies For Post-Literacy and Continuing Education in Kenya, Nigeria, Tanzania, and United Kingdom*, 1985.
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Henderson, N. Collaborative Strategies To Advance student Learning. *National Education Association*, 2015. 1-77
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). hlm.66
- Hall, G. E., Quinn, L. F. & Gollnick, D. M. (2008). *Mengajar Dengan Senang*. Jakarta: PT Indeks, 2008.
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- McGuigan, McNally, & Wyness. Student Awareness of Costs and Benefits of Educational Decisions: Effects of an Information Campaign. *Centre for the Economics of Education*, (1-50), 2012.
- Ian G. *Nigeria Country File*. London: Franklin Watts, 2004.
- OECD. Financial Education in School. *International Network On Final Education*. Artikel (1-8), 2008.
- Ofojebe, W. N & Ezugoh, T. C. Teachers' motivation and its influence on quality assurance in the nigerian educational system. *An International Multi-Disciplinary Journal*. Vol. 4 (2) April, 2010
- Suyanto, B. Penyusunan Kebijaksanaan Program Untuk Mengeliminasi Angka Putus Sekolah Dan Siswa Rawan *Drop Out* Di Provinsi Jawa Timur. Makalah Diseminarkan Di Seminar Riset Yang dilaksanakan di The Aryaduta Lippo Village, Tangerang, 2012. *Proceeding*, (1-484)
- Soji O. *Revitalizing Nigerian Education in Digital Age*. New york: Trafford Publishing, 2012.
- Shalin, D.N. (2012). *Highschool Graduation And Dropout Rates In Nevada*. Las Vegas: Tyler, 2012).
- Suparlan. (2006). *Guru Sebagai Profesi*. (Yogyakarta; Hikayat, 2006).
- Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education*, London: Kogam Page, 1993.
- Pidarta, M. *Manajemen pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Wahyudin, D. Model Pembelajaran *Icare* Pada Kurikulum Mata Pelajaran TIK di SMP *Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11, No. 1, April 2010*
- Weiss, H. B., et al. Reframing Family Involvement In Education: Supporting Families To Support Educational Equity. *Research Review* No. 5 (1-52), 2009.

Zazin, N. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan*. Jogjakarta: AR-RUZ MEDIA, 2011.